

SKRIPSI

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN
KEUANGAN PEERINTAH DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH (OPD) DI KABUPATEN KARIMUN**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelajar Sarjana Strata
Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*

Pekanbaru



OLEH :

SITI NUR HAFIZHA

NPM : 165310721

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2020



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI


Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp +62 761 674674 Fax +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Web : www.c.uir.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SITI NUR HAFIZHA
NPM : 165310721
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : AKUNTANSI SI
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI
KABUPATEN KARIMUN

Disetujui oleh:

PEMBIMBING


Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Mengetahui:

DEKAN

KETUA JURUSAN AKUNTANSI SI


Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan. Pekanbaru.Riau. Indonesia - 28284
Telp +62 761 674674 Fax +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Web : www.c.uir.id

NOTULENSI SEMINAR HASIL

1. Nama Mahasiswa : Siti Nur Hafizha
2. NPM : 165310721
3. Hari/Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2020
4. Judul Penelitian : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karimun.

Sidang dibuka oleh **Dr. Firdaus AR, SE.,M.Si.,Ak.,CA** dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempersentasikan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1.	H. Burhanuddin, SE. M.Si <ul style="list-style-type: none">o Perbaiki SKPD menjadi OPD karena sudah berganti istilah.o Menambahkan pembahasan pada deskripsi responden.o Menambah penjelasan pada statistic deskriptif	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Terlihat pada cover, halaman 6 Terlihat pada halaman 36 Terlihat pada halaman 39	
2.	Lintang Nur Agya, SE., M.Acc.,Ak <ul style="list-style-type: none">o Perhatikan penulisan sistem yang masih ejaan Bahasa Inggriso Memperbaiki indikator yang digunakan.o Pembahasan hasil penelitian untuk pengawasan keuangan daerah, ditambahkan kata penghubung yang jelas.	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Terlihat pada halaman 50 Terlihat pada halaman 26 Terlihat pada halaman 52	

Disetujui

Mengetahui,



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., AK., CA
Ketua Jurusan Akuntansi S1



Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA
Pembimbing



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan. Pekanbaru.Riau. Indonesia - 28284
Telp +62 761 674674 Fax +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Web : www.c.uir.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : SITI NUR HAFIZHA
NPM : 165310721
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : AKUNTANSI SI
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI KABUPATEN KARIMUN
SPONSOR : **Dr. Firdaus AR, SE.,M.Si.,Ak.,CA**

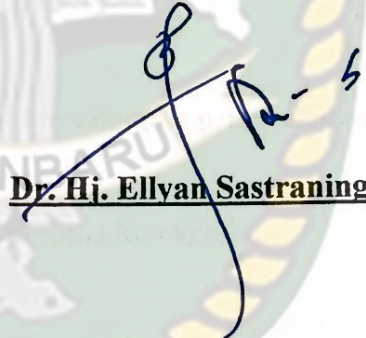
Dengan Rincian Sebagai Berikut:

Tanggal	Catatan		Berita Acara	Paraf	
	Sponsor	Co Sponsor		Sponsor	Co Sponsor
16/12/2019	X		- Latar Belakang Masalah - Rumusan Masalah		
28/12/2019	X		- Latar Belakang Masalah		
02/01/2020	X		- Telaah Pustaka - Motode Penelitian		
10/01/2020	X		- ACC proposal		
20/06/2020	X		- Buat Abstrak - Tujuan Penelitian Sesuai Rumusan Masalah - Ikuti Pedoman Baru - Hipotesis Disesuaikan Pada Rumusan Masalah		

			- Menambahkan Pembahasan Hasil Penelitian - Menambahkan Pembahasan Saran Sesuai Dengan Manfaat Penelitian		
14/07/2020	X		- Rumusan Masalah Disusun Dengan Kalimat Yang Benar - Tujuan Penelitian Disusun Dengan Kalimat Yang Benar - Tambahkan Pembahasan Pada Hasil Penelitian		
25/07/2020	X		- ACC Seminar Hasil		

Pekanbaru, 01 September 2020

WAKIL DEKAN I


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Siti Nur Hafizha
NPM : 165310721
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karimun.
Hari/Tanggal : Jum'at 28 Agustus 2020
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	H. Burhanuddin, SE., M.Si		
2	Lintang Nur Agya, SE., M.Acc., Ak		

Hasil Seminar : *)

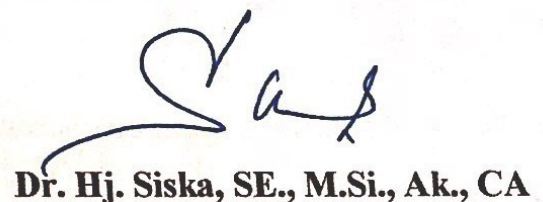
1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 76)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan



Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si
Wakil Dekan I

Pekanbaru, 28 Agustus 2020
Ketua Prodi



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

**TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi / oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
 2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
 6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
 7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 - a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
 - b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
 - c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 - d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

Nama : Siti Nur Hafizha
 N P M : 165310721
 Program Studi : Akuntansi S1
 Judul skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karimun.

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor Kepala, IV/a	Materi	Ketua
2	H. Burhanuddin, SE., M.Si	Lektor, C/c	Sistematika	Sekretaris
3	Lintang Nur Agia, SE., M.Acc., Ak	Assisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Hougesti Diana, SE., M.Ak	Assisten Ahli, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 28 Agustus 2020
 Dekan,

 Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI**

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 1074/KPTS/FE-UIR/2020, Tanggal 27 Agustus 2020, Maka pada Hari Jum'at 28 Agustus 2020 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi Akuntansi S1 Tahun Akademis 2020/2021


- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Siti Nur Hafizha |
| 2. NPM | : 165310721 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karimun. |
| 5. Tanggal ujian | : 28 Agustus 2020 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau Fekon UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B+) 74,15 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1


Dosen penguji :

1. Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA
2. H. Burhanuddin, SE., M.Si
3. Lintang Nur Agya, SE., M.Acc., Ak

(.....)
(.....)
(.....)

Notulen

1. Haugesti Diana, SE., M.Ak


(.....)

Pekanbaru, 28 Agustus 2020
Mengetahui
Dekan,


Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

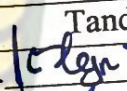
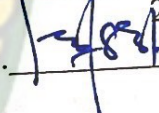
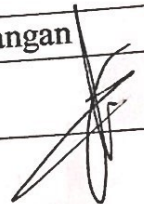
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Siti Nur Hafizah
NPM : 165310721
Judul Proposal : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern & Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD di Kabupaten Karimun
Pembimbing : I. Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA
Hari/Tanggal Seminar : Kamis / 27 Februari 2020

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

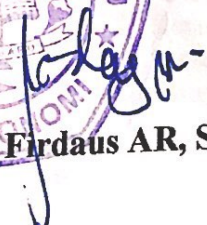
1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

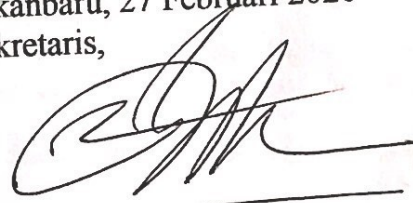
No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. Firdaus AR, SE.,M.Si.,Ak.,CA		1. 
2.	Dian Saputra, SE.,M.Acc.,Ak.,CA		3. 
3.	Efi Susanti, SE., M.Acc		

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
A.n. Dekan Bidang Akademis,


Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Pekanbaru, 27 Februari 2020
Sekretaris,


Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 3073/Kpts/FE-UJR/2019
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
Bismillahirrohmanirrohim
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
 2. Undang-Undang RI Nomor:14 Tahun 2005
 3. Undang-Undang RI Nomor:12 Tahun 2012
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014
 5. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
 b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
 6. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
 a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
 b. Nomor: 10/Skep/YLPI/TV/1987
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 8. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 a. Nomor: 510/A-UJR/4-1987

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, Ak, CA	Lektor Kepala, IV/a	Pembimbing

② Mahasiswa yang dibimbing adalah:
 N a m a : Siti Nur Hafizha
 N P M : 165310721
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi / S1
 Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD di Kabupaten Karimun.

- Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UJR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas islam Riau.
- Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal
- Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.

Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.



Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 27 November 2019
 Dekan,

Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA

Tembusan : Disampaikan pada:

- Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
- Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UJR di Pekanbaru.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوِيَّةُ

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email: fekon@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : SITI NUR HAFIZHA
NPM : 165310721
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA OPD DI KABUPATEN KARIMUN

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 27 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 1 September 2020
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karimun. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karimun. Total responden dalam penelitian ini adalah 80 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Teknik analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS Versi 26.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan daerah di Kabupaten Karimun.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Keuangan Daerah, Nilai Informasi Laporan Keuangan.

ABSTRACT

This study aims to finding the effect of intern control system and regional financial supervision on the value of financial reporting information regional government Karimun Regency. The population in this study are all regional organisation units (OPD) in Karimun Regency. Total of respondents in this research are 80 of respondents. Method of data collection was questionnaire. The technique of data analysis used multiregression with SPSS version 26.

The result showed that the internal control system and regional financial supervision an affect on the value of financial reporting information regional government Karimun Regency.

Key Words: Internal Control System, Regional Financial Supervision, Value of Financial Reporting Information.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADA OPD DI KABUPATEN KARIMUN”** guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M.Si.,Ak.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dan pembimbing yang telah meluangkan waktu dan sabar membimbing penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Siska, SE. Msi.,Ak.,CA sebagai ketua jurusan Program Studi Ekonomi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

4. Bapak Hariswanto, SE., M.Si. Ak., CA selaku dosen Pembimbing Akademik yang juga telah membantu penulis dalam berkonsultasi selama perkuliahan.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan selalu dalam keberkahan Allah SWT, sehingga dapat berguna dikemudian hari. Seluruh pimpinan, staf tata usaha, staf perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Kedua Orang Tua dan keluarga besar atas Segala curahan kasih sayang, perhatian, dukungan dan arahan serta do'a yang selalu diucapkan kepada-Nya.
7. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan wawasan serta pengetahuan penulis.

Pekanbaru, 28 July 2020

Penulis,

SITI NUR HAFIZHA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1 Telaah Pustaka.....	9
2.1.1 Teori Agency	9
2.1.2 Nilai Informasi Laporan Keuangan.....	10

2.1.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	13
2.1.4 Pengawasan Keuangan Daerah.....	17
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Pemikiran	22
2.4 Hipotesis.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Objek dan Lokasi Penelitian	24
3.2 Operasional dan Variabel Penelitian.....	24
3.3 Populasi dan Sampel.....	27
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN	
4.1 Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Karimun.....	33
4.1.2 Letak Geografis dan Visi Misi.....	33
4.1.3 Gambaran Umum OPD di Kabupaten Karimun.....	34

4.2 Hasil Penelitian.....	36
4.2.1 Deskripsi Responden	36
4.2.2 Teknik Analisis Data.....	38
4.2.2.1 Statistik Deskriptif	38
4.2.2.2 Uji Kualitas Data.....	40
4.2.2.2.1 Uji Validitas	40
4.2.2.2.2 Uji Reliabilitas	41
4.2.2.3 Uji Asumsi Klasik	42
4.2.2.3.1 Uji Normalitas	42
4.2.2.3.2 Uji Multikorelasionalitas	44
4.2.2.3.3 Uji Heterokedatisitas	45
4.2.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda	46
4.2.2.5 Pengujian Hipotesis.....	47
4.2.2.5.1 Koefisien Determinasi	47
4.2.2.5.2 Uji Simultan (Uji T)	48
4.2.2.5.3 Uji Parsial (Uji F).....	49
4.3 Pembahasan.....	50

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan..... 55

5.2 Saran-saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS



DAFTAR TABEL

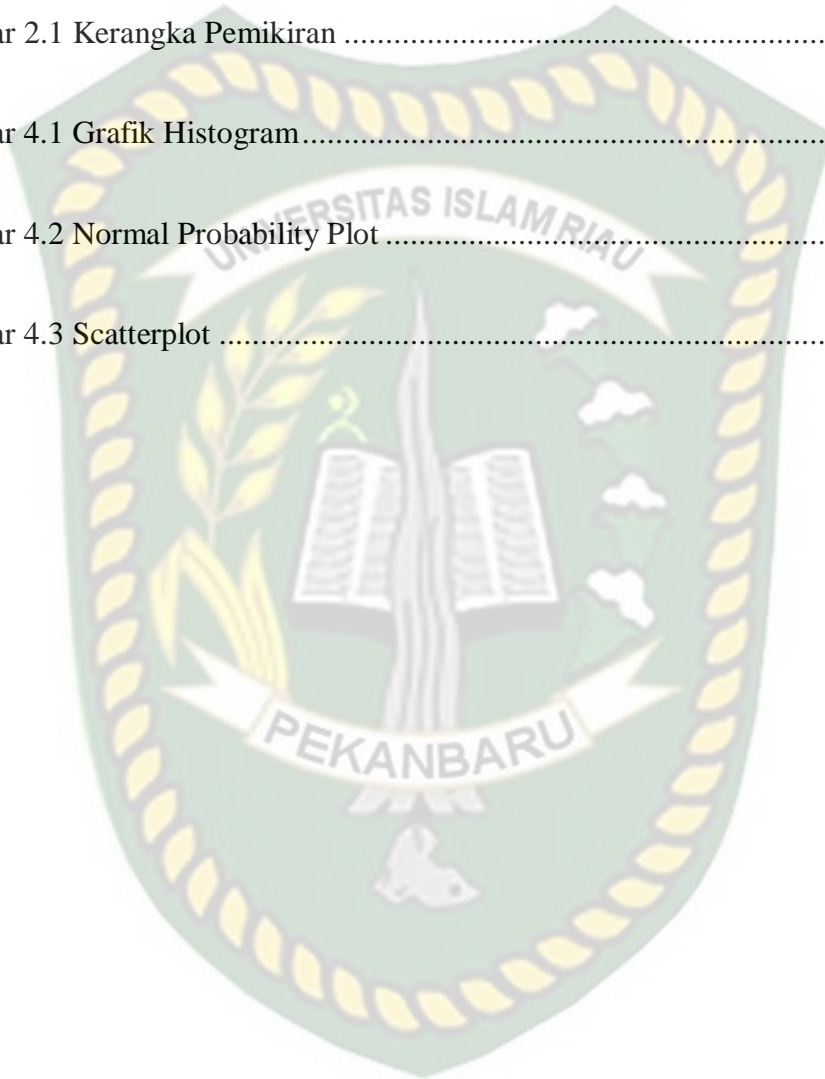
Tabel

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.1 Daftar sampel yang dijadikan objek penelitian.....	28
Tabel 4.1 Daftar SKPD di Kabupaten Karimun.....	34
Tabel 4.2 Tingkat Pengembalian Kuesioner	36
Tabel 4.3 Karakteristik Responden.....	37
Tabel 4.4 Deskriptif Statistik.....	39
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas	40
Tabel 4.6 Hasil Uji Reabilitas	41
Tabel 4.7 One Sample Kolmogorov-Mirnov	43
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas	44
Tabel 4.9 Regresi Linier Berganda.....	46
Tabel 4.10 Koefisien Determinasi	47
Tabel 4.11 Hasil Uji T.....	49
Tabel 4.12 Hasil Uji F.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	22
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	42
Gambar 4.2 Normal Probability Plot	43
Gambar 4.3 Scatterplot	45



DAFTAR LAMPIRAN

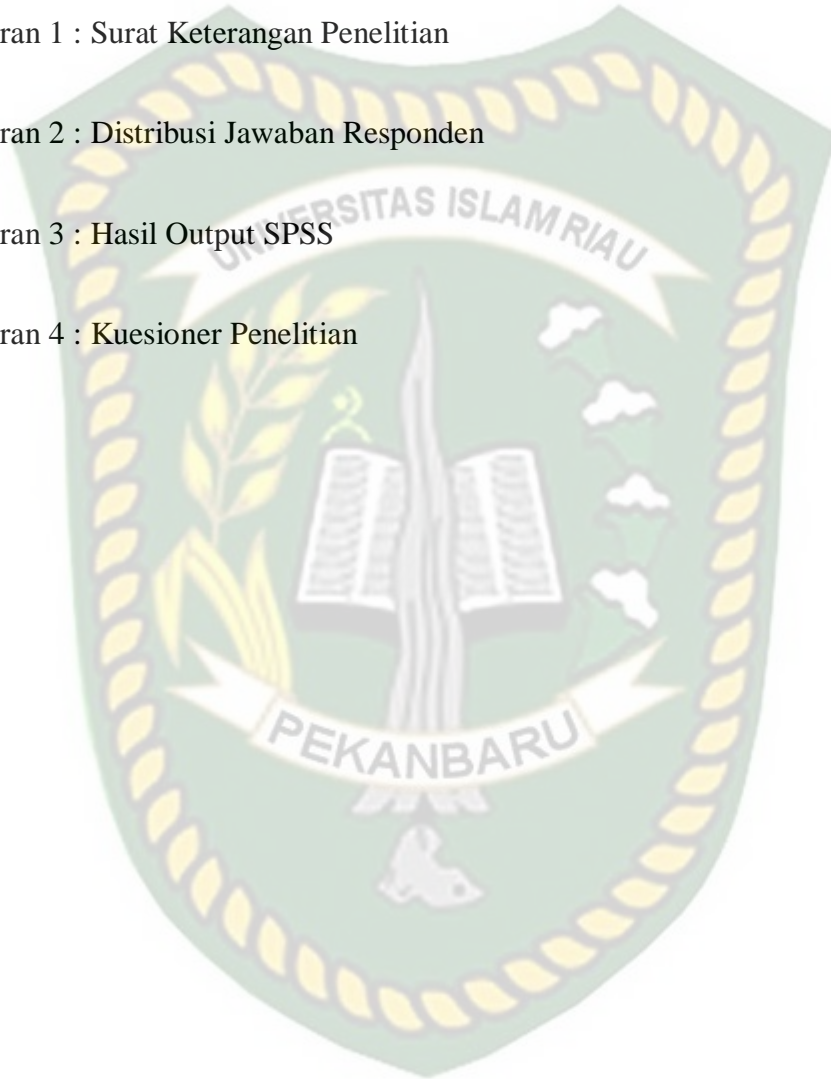
Lampiran

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 2 : Distribusi Jawaban Responden

Lampiran 3 : Hasil Output SPSS

Lampiran 4 : Kuesioner Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah baik dipusat maupun pemerintah daerah agar dapat menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas itu sendiri adalah penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya (Peny Kusumastuti, 2014:2).

Akuntabilitas mempunyai syarat bahwasanya pengambil keputusan harus bersikap sesuai dengan perintah atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara-cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan, hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

Sebagai salah satu Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan adalah laporan terstruktur yang berisi tentang transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan yang dipublikasikan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang telah berlaku dan telah ditetapkan oleh pemerintah, agar laporan tersebut memiliki kualitas informasi laporan keuangan yang baik serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh penggunanya dari berbagai kalangan.

Apabila informasi yang ada dalam Laporan Keuangan Pemda memenuhi syarat kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013, artinya Pemda telah mampu melakukan transparansi serta akuntabilitas dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah (pemda) memerlukan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik dan memadai.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) selalu berkaitan dengan sebuah laporan keuangan. SPI adalah satu proses atau tahapan yang diciptakan guna memberikan keyakinan atas andalnya suatu laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang sesuai. Dimana, akan menghasilkan laporan keuangan tersebut mempunyai nilai informasi yang baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan asset yang berdampak material pada keuangan pemerintah. Oleh sebab itu, jika penerapan Sistem Pengendalian Intern berjalan dengan baik maka laporan keuangan yang akan dihasilkan juga memiliki nilai informasi yang sangat baik. Namun sebaliknya, jika penerapan Sistem Pengendalian Intern tidak berjalan dengan semestinya maka dampak yang akan muncul yakni nilai informasi yang dihasilkan menjadi kurang baik.

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dibuat oleh pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan konsolidasi laporan keuangan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pengawasan keuangan daerah merupakan suatu proses kegiatan dengan tujuan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pengawasan dalam sistem pengendalian intern difokuskan agar memperoleh keyakinan yang wajar bagi para penggunanya.

Hasil penelitian Gery Armando (2013) tentang pengaruh sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan. Objek penelitiannya yaitu setiap OPD Kabupaten Bukittinggi yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Nilai Informasi Keuangan Pemerintah.

Hasil penelitian Feti Ermawati (2015) meneliti tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada OPD Kabupaten Pelalawan). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara simultan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah

daerah dan secara parsial sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Namun berbeda dengan penelitian Tania Moko Ginta (2017) meneliti tentang pengaruh sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Bolang Mongondow Utara bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan. Sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Dita Arfianti (2011) meneliti yaitu tentang faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah (Studi pada OPD di Kabupaten Batang), hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap keandalan informasi keuangan pemerintah daerah sedangkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dari penelitian sebelumnya, masih terdapat inkonsistensi terhadap variabel sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan. Karena itu peneliti ingin melakukan penelitian ulang kepada variabel nilai informasi laporan keuangan di pemerintah Kabupaten Karimun karena alasan fenomena-fenomena sebagai berikut.

Pertama, laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Karimun masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah di Karimun adalah hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dikarenakan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan oleh BPK dalam pelaksanaan audit keuangan. Pertama, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian LKPP Karimun dari tahun 2008 hingga 2011. Ini berarti masih ada penggunaan keuangan Negara yang bersifat material menyimpang dari standar akuntansi pemerintahan. (tanjungpinang.bpk.go.id)

Kedua, dari hasil pemeriksaan BPK RI terdapat temuan dari entitas atas ketidakhematan yang mengakibatkan kerugian daerah. Di dalam IHPS II Tahun 2010 BPK RI menjelaskan bahwa adanya pembayaran insentif komunikasi dan kerajinan kepada direksi dan pegawai Perusda Kabupaten Karimun senilai Rp711,74 juta yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. (www.bpk.go.id)

Ketiga, dari hasil pemeriksaan BPK RI dalam IHPS II Tahun 2009 BPK RI juga terdapat temuan dari entitas atas lemahnya sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai yaitu angka yang disajikan dalam neraca senilai Rp1,01 triliun tidak didukung daftar aset sehingga penyajian saldo aset tetap pada neraca per 31 Desember 2008 tidak dapat diyakini kewajarannya. (www.bpk.go.id)

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis berniat untuk mengangkat judul penelitian ini dengan judul **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai**

Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD di Kabupaten Karimun.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun?
- b. Apakah Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun?
- c. Apakah Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah di uraikan diatas, maka tujuannya adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Karimun.
- b. Untuk mengetahui apakah Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Karimun.

- c. Untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Karimun?

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih banyak tentang akuntansi keuangan di bidang pemerintahan.
- b. Bagi akademik, sebagai bahan dasar untuk penelitian terutama di bidang sektor publik, serta sebagai referensi penelitian selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa di lingkungan akademika.
- c. Bagi sektor publik, dapat dijadikan sebagai masukan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan di sektor publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman tentang proposal ini, maka penulisan dibagi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah yang telah dikaji, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang telaah pustaka (nilai informasi laporan keuangan, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah), pembahasan tentang penelitian terdahulu serta pengembangan hipotesis dalam penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan terdiri dari jenis penelitian, populasi, sampel dan responden, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, pengukuran variabel, instrument penelitian, uji validitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis, teknik analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang sejarah berdirinya pemerintah daerah Kabupaten Karimun, letak geografis, organisasi, visi dan misi pemerintahan Karimun, hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menutup dengan membuat kesimpulan dan memberikan saran-saran yang dirasakan perlu sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 TELAAH PUSTAKA

2.1.1 *Agency Theory*

Menurut Arfan Ikhsan Lubis (2011:92) dari sudut pandang teori agensi, principal (pemilik atau manajemen puncak) membawahi agen (karyawan atau manajer yang lebih rendah) untuk melaksanakan kinerja yang efisien. Teori ini berasumsi bahwa kinerja yang efisien dan kinerja organisasi dapat ditentukan oleh usaha yang telah dilakukan serta pengaruh kondisi lingkungan. Sementara itu, secara umum teori ini berasumsi bahwa principal tersebut bisa bersikap netral terhadap resiko berbeda dengan agen dimana agen cenderung bersikap menolak usaha dan risiko. Mengacu pada sebuah teori yakni teori agensi (*agency theory*), akuntabilitas publik adalah kewajiban dari pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan seluruh pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala sesuatu aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Faristina,2011).

Berkaitan dengan berbagai masalah dalam keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam suatu organisasi sektor publik adalah satu konsep dimana berdasarkan dari teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan tersebut, pemerintahlah yang memegang posisi sebagai agen yang mendapat kewajiban

untuk memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas serta mampu membuat keputusan yang baik dari segi keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

2.1.2 Nilai Informasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah salah satu bentuk tanggungjawab atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang dipublikasikan mesti disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar laporan keuangan yang dihasilkan tersebut bisa dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya maupun dibandingkan dengan laporan keuangan dari entitas lain.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan adalah laporan terstruktur entitas pelaporan. Laporan keuangan yang telah dihasilkan dari masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kemudian dijadikan dasar yang paling utama dalam membuat laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota (Erlina, dkk. 2015:19).

Menurut Suwardjono, dalam penelitian Dwi Utama Mandala Putra (2015), suatu informasi disebut memiliki nilai apabila informasi tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh penggunanya. Kebermanfaatan ini adalah satu karakteristik yang hanya bisa ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai dan

keyakinan pengguna terhadap informasi. Adapun ciri-ciri kualitatif laporan keuangan pemerintah adalah sebagai prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) antara lain:

2.1.2.1 Relevan

Sebuah laporan dikatakan relevan jika informasi yang ada di dalamnya secara langsung bisa mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna dengan cara membantu mereka melakukan evaluasi dan koreksi peristiwa yang terjadi saat masa lalu maupun masa kini serta bisa memprediksi peristiwa yang akan terjadi pada masa depan. Informasi yang relevan akan memiliki beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi yang memungkinkan para penggunanya untuk menegaskan alat pengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
- 2) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi yang bisa memberi gambaran pada pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan data yang berasal dari masa lalu serta berbagai kejadian pada masa kini.
- 3) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi ini disajikan diwaktu yang tepat sehingga dapat berpengaruh serta berguna pada saat akan dilakukan pengambilan keputusan.

- 4) Lengkap, artinya memuat seluruh informasi akuntansi yang bisa mempengaruhi setiap pengambilan keputusan. Informasi ini diungkap dengan jelas agar tidak terjadi kekeliruan.

2.1.2.2 Andal

Suatu laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi yang terdapat didalamnya terlepas dari pengertian yang bisa menyesatkan, kesalahan material, penyajian semua fakta secara jujur, serta bisa diverifikasi. Informasi dapat dikatakan andal jika mampu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Penyajian jujur. Informasi yang telah didapatkan menggambarkan jujur setiap transaksi serta peristiwa lainnya yang mesti disajikan dengan jujur.
- 2) Dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat di uji, apabila hasil uji pertama dan selanjutnya berbeda, hasil dari uji tersebut menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu jauh.
- 3) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan khalayak umum dan tidak akan kepada pihak manapun serta bersikap stabil.

2.1.2.3 Dapat dipahami

Suatu laporan keuangan dapat dipahami jika informasi yang disajikan berbentuk jelas serta istilah yang digunakan telah disesuaikan dengan pemahaman para pengguna laporan keuangan tersebut.

2.1.2.4 Dapat dibandingkan

Suatu laporan keuangan bisa dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya bahkan bisa dibandingkan dengan laporan keuangan dari entitas lainnya guna untuk mengevaluasi laporan keuangan tersebut kedepannya.

2.1.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Mulyadi (2013:163) Sistem Pengendalian Intern mencakup struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Awal perkembangan istilah sistem pengendalian intern dimulai dari istilah internal cek, yang kemudian sejak tahun 1949 berubah menjadi sistem pengendalian intern.

Pada dasarnya sistem pengendalian intern telah dikembangkan secara alamiah melalui pengalaman atau *trial and error*, dan secara naluriah banyak ditemukan pada para pengusaha tradisional yang berusaha mengembangkan usahanya, kemudian sistem pengendalian intern mulai berkembang sebagai kebutuhan.

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan Sistem Pengendalian Intern yang akan diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah baik di pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut Mulyadi (2013:163) Tujuan dari Sistem Pengendalian Intern adalah:

1. Menjaga kekayaan organisasi,
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,
3. Mendorong efisiensi, dan

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, beberapa unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Pemerintah mengacu pada Sistem Pengendalian Intern yang telah dilaksanakan baik dari lingkungan pemerintahan hingga diberbagai Negara. Diterapkannya unsur ini mempunyai tujuan untuk menyatukan semua unsur dan menjadi bagian integral dari setiap kegiatan instansi pemerintah, yang meliputi;

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus mampu menciptakan serta memelihara lingkungan yang berada dalam seluruh organisasi. Ini akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk sepenuhnya mendukung dibentuknya sistem pengendalian intern dan manajemen yang baik.

Lingkungan pengendalian meliputi:

- a) Penegakan integritas dan nilai etika
- b) Komitmen terhadap kompetensi
- c) Kempemimpinan yang kondusif
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan;
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

2. Penilaian Resiko

Pengendalian intern harus mampu memberi penilaian atas setiap resiko yang akan dihadapi oleh masing-masing unit organisasi baik dari dalam maupun dari luar. Penilaian resiko itu sendiri terdiri atas;

- a) Identifikasi Resiko
- b) Analisis Resiko

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian berguna untuk membantu memastikan bahwa arah pimpinan dari setiap Instansi Pemerintah dilaksanakan sesuai tujuan. Kegiatan pengendalian yang dilakukan mesti bersifat efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi hingga sesuai dengan ukuran, kompleksitas serta sifat dari tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian itu sendiri terdiri atas:

- a) Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
- b) Pembinaan sumberdaya manusia ;
- c) Pengendalian terhadap pengelolaan sistem informasi;
- d) Pengendalian fisik atas aset;
- e) Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kerja
- f) Pemisahan fungsi;
- g) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi kejadian;
- i) Pembatasan akses dan sumber daya pencatatannya
- j) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi serta kejadian penting

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi yang telah didapatkan harus dicatat dan dilaporkan kepada Instansi Pemerintahan atau pihak lain yang telah ditentukan. Informasi itu disajikan dalam suatu bentuk, sarana dan harus diselenggarakan secara tepat waktu sehingga setiap pimpinan dari masing-masing Instansi Pemerintah dapat melakukan pengendalian dan tanggung jawab. Untuk menyelenggarakan sistem informasi yang efektif pimpinan instansi pemerintah harus:

- a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilakukan agar dapat menilai dari setiap informasi kinerja yang diperoleh dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya hanya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan pada sistem pengendalian intern dilakukan melalui beberapa hal yaitu pemantauan secara berkelanjutan, evaluasi yang dilaksanakan terpisah, dan tindak lanjut atas hasil rekomendasi audit *review* lainnya.

2.1.4 Pengawasan Keuangan Daerah

Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang dapat dinilai berupa uang maupun barang. Dari penjelasan diatas pokok pengertian keuangan negara adalah semua masalah yang menyangkut tentang kekayaan milik negara, baik yang ada dalam Lembaga atau bank pemerintah yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Maka pada dasarnya pengertian keuangan negara dengan pengertian keuangan daerah sama, dimana “negara” diasumsikan sebagai “daerah”.

Sementara pengawasan menurut keputusan presiden No.74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disiapkan dan ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan..

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam suatu tahun anggaran mencakup:

- 1) Pendapatan daerah yakni seluruh penerimaan Negara yang baik yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan daerah bukan pajak serta penerimaan hibah selama tahun anggaran bersangkutan.
- 2) Belanja daerah yaitu seluruh pengeluaran daerah guna membiayai belanja pemerintah daerah melalui dana perimbangan selama tahun anggaran daerah yang telah ditentukan.

- 3) Defisit belanja daerah yaitu selisih kurang antara pendapatan dengan belanja daerah.
- 4) Pembiayaan defisit yaitu semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja daerah yang bersumber dari pembiayaan dalam dan luar pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah pusat.
- 5) Surplus pendapatan daerah yaitu selisih lebih antara pendapatan dengan belanja daerah.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang harus diperhatikan yang menjadi norma dan prinsip dasar serta menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga pengawasan membantu tercapainya tujuan yang diharapkan oleh masing masing instansi pemerintah.

Asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah mengikat pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah. Keuangan daerah harus dikelola dengan berdasarkan pada prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, OPD dilarang untuk melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka penerimaan pendapatan daerah, semua penerimaan dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Rekening kas umum daerah dalam hal ini adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh kepala

daerah. Setiap penerimaan harus disertai dengan buktiatas setoran yang lengkap, dan OPD dilarang melakukan pemungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dari sisi pengeluaran, setiap pengeluaran harus didukung juga dengan bukti yang lengkap, jelas, dan sah agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaporannya dalam laporan keuangan daerah, pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditertibkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran.

Setelah akhir tahun anggaran dan pengelolaan berakhir menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada Standard Akuntansi Pemerintah (SAP). Sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan dalam menganalisis nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
----	----------	-------	----------	-------

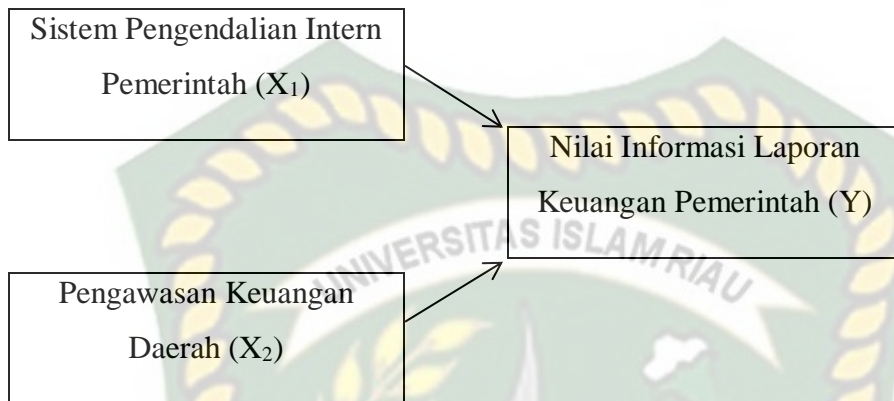
	Terdahulu	Penelitian	Penelitian	Penelitian
1	Gery Armando (2013)	Pengaruh sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah	Variabel Indenpenden: -Sistem pengendalian intern -Pengawasan keuangan daerah Variabel Dependent: -Nilai informasi laporan keuangan pemerintah	-Berpengaruh -Berpengaruh -Berpengaruh
2	Feti Ermawati (2015)	Pengaruh sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Pelalawan)	Variabel Indenpenden: -Sistem Pengendalian Intern - Pengawasan Keuangan Daerah Variabel Dependent: -Kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah	-Berpengaruh -Berpengaruh -Berpengaruh
3	Dwi Utama Mandala Putra (2015)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (studi empiris OPD Kabupaten	Variabel Indenpenden: -Sistem Pengendalian Intern - Pengawasan Keuangan Daerah Variabel Dependent: -Kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah	-Berpengaruh -Berpengaruh -Berpengaruh

		Kampar)		
4	Suherni (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Indragiri Hulu)	Variabel independen: -sistem pengendalian intern -pengawasan keuangan daerah Variabel dependen: -nilai informasi laporan keuangan pemerintah	-Berpengaruh -Berpengaruh -Berpengaruh
5	Alfha Ryades (2016)	Pengaruh sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Siak	Variabel independen: -sistem pengendalian intern -pengawasan keuangan daerah Variabel dependen: -nilai informasi laporan keuangan pemerintah	-Berpengaruh -Berpengaruh -Berpengaruh

Berdasarkan hasil penelitian diatas dan permasalahan yang timbul menunjukkan bahwa lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah dalam pemerintahan mempengaruhi Nilai Informasi Keuangan yang disajikan masih kurang dalam pengetahuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Model Penelitian



2.4 Hipotesis

Berdasarkan model penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis ingin mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

H₂: Pengawasan Keuangan Daerah Pemerintah berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

H₃: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengawasan Keuangan Daerah Pemerintah berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 OBJEK DAN LOKASI PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terletak di Kabupaten Karimun. Penelitian ini menjelaskan tentang hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun.

3.2 OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar hipotesis yang diajukan dapat diuji dan pertanyaan peneliti dapat dijawab. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu variabel indenpenden dan variabel dependen.

3.2.1 Variabel Independen (X)

Variabel indenpenden ialah tipe variabel yang menjelaskan atau yang mempengaruhi variable yang lain. Berdasarkan uraian diatas adapun variable indenpenden adalah:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X₁)

Sistem pengendalian intern pemerintah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengendalian intern pada OPD dalam bidang akuntansi dan

penyusunan laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan nilai informasi laporan keuangan yang andal, yang indikator variabel Sistem pengendalian intern ialah:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan/aktivitas pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Pengukuran Sistem pengendalian intern menggunakan instrumen kuesioner dari penelitian Gerry Armando (2013). Pengukuran variabel ini menggunakan 9 item pertanyaan. Dengan skala Likert 1-5 poin. Skor terendah 1 intensitasnya “sangat setuju”. Responden diminta untuk memberikan pernyataan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan variabel Sistem pengendalian intern (X1) yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

2. Pengawasan Keuangan Daerah (X₂)

Pengawasan menurut keputusan presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa: “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk menjamim pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Indikator variabel penerapan pengawasan keuangan daerah ialah:

1. Asas umum pengelolaan keuangan daerah,
2. Pejabat- pejabat yang mengelola keuangan daerah,
3. Pembinaan Pengelolaan keuangan daerah,
4. Pengaturan Pengelolaan keuangan daerah,
5. Struktur APBD,
6. Penyusunan serta penetapan APBD,
7. Pelaksanaan dan perubahan APBD,
8. Pertanggungjawaban pengelolaan APBD,

Pengukuran pengawasan keuangan daerah menggunakan instrumen kuesioner dari penelitian Gerry Armando (2013). Pengukuran variabel ini menggunakan 8 item pertanyaan. Dengan skala Likert 5 poin. Skor terendah yaitu 1 intensitasnya “sangat tidak setuju”. Kemudian skor tertinggi adalah (5) intensitasnya “sangat setuju”. Responden diminta untuk memberikan pernyataan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan variabel pengawasan keuangan daerah (X2) yang diajukan sesuai dengan kondisi yang terjadi sesungguhnya.

3.2.2 Variabel Dependen (Y)

1. Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel terikat didalam penelitian ini yaitu Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Karimun. Menurut Wilkinson (2000:18) dalam penelitian Windy Febrianti (2015) yaitu taraf (mutu) atau terpenuhinya kriteria atau harapan yang melekat pada informasi laporan keuangan pemerintah.

Indikator variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah dalam PP 71 Tahun 2010 ialah:

1. Relevan, maksudnya laporan keuangan menyediakan informasi dapat mengoreksi aktivitas keuangan masa lalu dan memprediksi masa yang akan datang.
2. Andal ialah informasi dalam penyajian laporan keuangan secara fakta, jujur, dan dapat diverifikasi.
3. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
4. Dapat dipahami dengan jelas informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen yang telah dikembangkan oleh saudara Gerry Armando (2013) yang terdiri dari 10 item pertanyaan. Dengan skala Likert 5 poin. Skor terendah 1 intensitasnya “sangat tidak setuju”. Kemudian skor tertinggi (5) intensitasnya “sangat setuju”. Responden diminta untuk memberikan pernyataan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan variabel nilai informasi laporan keuangan (Y) yang diajukan sesuai dengan kondisi yang terjadi sesungguhnya.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi juga dapat diartikan sebagai totalitas semua nilai yang mungkin menghitung atau pengukuran kuantitatif mengenai suatu karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan lengkap dan jelas dan yang ingin dipelajari sifatnya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun yaitu 42 OPD.

Sampel adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu OPD yang memiliki struktur organisasi lengkap seperti Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Keuangan beserta Staf Bagian Keuangan berjumlah 2 orang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karimun dengan alasan mereka adalah pihak yang berkompeten untuk memberikan jawaban sesuai dengan tujuan penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 OPD yaitu Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah. Daftar sampel dan responden penelitian dapat dilihat pada tabel :

TABEL 3.1
Responden Penelitian

NO	NAMA OPD	JUMLAH RESPONDEN
1	Sekretariat Daerah	3
2	Sekretariat DPRD	3
3	Inspektorat	3
4	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	3

5	Badan Pendapatan Daerah	3
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3
9	Dinas Pendidikan	3
10	Dinas Kesehatan	3
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3
12	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan	3
13	Dinas Sosial	3
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3
15	Dinas Lingkungan Hidup	3
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3
18	Dinas Perhubungan	3
19	Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu	3
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3
21	Dinas Persenibud	3
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	3
23	Dinas Perikanan	3
24	Dinas Pangan dan Pertanian	3
25	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Energi Sumber Daya Manusia	3
26	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	3
27	Kantor Penanggulangan Bencana Daerah	3
28	Kantor Pemberdayaan Perempuan	3
29	Satuan Polisi Pamong Praja	3
30	Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun	3
JUMLAH		90

Sumber: www.karimunkab.go.id

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber (tanpa perantara). Data primer yang diperoleh adalah hasil pengisian kuisioner oleh 3 orang responden yakni Kepala Dinas, Bendaharawan, dan Staf Penyusun Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian. Untuk mengambil data serta informasi yang dilakukan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

- a) Interview, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai langsung anggota operasi perangkat daerah (OPD) di pemerintahan Kabupaten Karimun.
- b) Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Tujuan dari analisis data yaitu mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung didalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

3.6.1 Uji Kualitas Data

3.6.1.1 Uji Validitas

Validitas mengacu sejauh suatu tes atau skala dalam menjalankan fungsi pengukurannya (Saifuddin, azwar : 2014). Validitas bisa diartikan sebagai ukuran

untuk menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrument yang valid dan sah memiliki validitas yang tinggi, yang berarti bahwa alat ukur yang digunakan tersebut sudah tepat. Uji validitas dapat dilaksanakan dengan metode melihat korelasi pada skor masing-masing item pertanyaan dalam kuesioner dengan skor totalnya.

3.6.1.2 Uji Realibilitas

Reabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian keprilakuan mempunyai keandalan sebagai alat ukur, seperti di ukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari periode waktu ke waktu jika fenomena yang diukur tersebut tidak berubah. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal apabila jawaban responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

3.6.2 Analisis Linier Berganda

Analisis statistik yang digunakan adalah persamaan Regresi Linier berganda dengan model persamaan berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

α = Konstanta

$b_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi Parsial

X_1 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

X_2 = Pengawasan Keuangan Daerah

e = Tingkat Kesalahan Pengganggu (error item)

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah didalam model regresi tersebut terdapat suatu penyimpangan, sehingga perlu diadakan pemeriksaan dengan menggunakan pengujian normalitas, multikorelasionalitas, dan heterokedatisitas.

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistic (Ghozali,2016). Pengujian normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Apabila data hasil perhitungan *one-sample Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai diatas 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, apabila data hasil perhitungan *one-sample Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai dibawah 0,05 maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali,2016)

3.6.3.2 Uji Multikorelasionalitas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independent. Uji

multikorelasionalitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat VIF dan nilai tolerance. Jika VIF >10 dan nilai tolerance $<0,10$ maka terjadi gejala multikorelasionalitas, dan apabila VIF <10 dan nilai tolerance $>0,10$ maka terbebas dari gejala multikorelasionalitas (Ghozali,2016)

3.6.3.3 Uji Heterokedatisitas

Uji heterokedatisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homokedatisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terkena gejala heterokedatisitas. Heterokedasitas dapat diketahui dengan cara melihat pola grafik *scatterplot*. Jika titik menyebar keatas dan kebawah angka nol pada sumbu Y, maka hal tersebut tidak terjadi heterokedatisitas. Selain itu untuk memastikannya dapat dilakukan uji gletser. Jika probabilitas signifikansi masing-masing variabel independent $>0,05$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedatisitas dalam model regresi (Ghozali,2016).

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan metode analisis regresi berganda yang berguna untuk mengukur pengaruh variabel Independen terhadap variabel dependen.

3.6.4.1 Uji F

Pengujian hipotesis yang dilaksanakan dalam penelitian ini akan menggunakan regresi linier berganda, yaitu dengan uji F (Uji Simultan).

1. Menentukan formula hipotesis

Ho : $b_1 = 0$ artinya, semua variabel bebas (X) secara simultan tidak mempengaruhi variabel terikat (Y)

Ha : $b_1 > 0$ artinya, semua variabel bebas (X) secara simultan mempengaruhi variabel terikat (Y)

2. Menentukan derajat kepercayaan 95% ($\alpha=0,05$)

3. Menentukan signifikansi

Nilai signifikansi (P value) $\leq 0,05$, maka hipotesis diterima

Nilai signifikansi (P value) $\geq 0,05$, maka hipotesis ditolak

3.6.4.2 Uji T

Uji statistik t dasarnya menggambarkan seberapa jauh pengaruh dari satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dapat dilakukan dengan memperhatikan kriteria seperti berikut:

- a. Jika nilai signifikan $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

b. Jika nilai signifikan $t \leq 0,05$ maka hipotesis diterima. Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016 ; 95-96) Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin R^2 mendekati satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 semakin kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun adalah salah satu wilayah di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan UU RI No.53 tahun 1999. Karimun sendiri merupakan salah satu pulau yang berbatasan langsung dengan negeri jiran yaitu Singapore dan Malaysia. Pada awal terbentuknya, karimun hanya memiliki 3 kecamatan yakni: Kecamatan Karimun, Kecamatan Moro, dan Kecamatan Kundur.

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Karimun

Visi : Terwujudnya kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim yang terdepan berlandaskan iman dan takwa.

Misi :

- Mengembangkan Pusat Pertumbuhan yang Handal serta Berdaya Saing melalui Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- Membangun Ekonomi kerakyatan yang Tangguh berbasis Sumber Daya Maritim dan Pertanian.
- Penguatan konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan.

- Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Kompetitif serta Menjawab Kebutuhan Daerah.
- Menjaga fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup.
- Membangun Masyarakat yang Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa.
- Mewujudkan Birokrasi Professional, Bersih dan Melayani.

4.1.3 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karimun

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karimun. Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi. Susunan organisasi dinas kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun

NO	NAMA OPD
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat
4	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5	Badan Pendapatan Daerah
6	Badan Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Dinas Pendidikan

10	Dinas Kesehatan
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan
13	Dinas Sosial
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Dinas Lingkungan Hidup
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18	Dinas Perhubungan
19	Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
21	Dinas Persenibud
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
23	Dinas Perikanan
24	Dinas Pangan dan Pertanian
25	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Energi Sumber Daya Manusia
26	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
27	Kantor Penanggulangan Bencana Daerah
28	Kantor Pemberdayaan Perempuan
29	Satuan Polisi Pamong Praja
30	Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun
31	Kecamatan Karimun
32	Kecamatan Tebing
33	Kecamatan Meral
34	Kecamatan Kundur
35	Kecamatan Moro
36	Kecamatan Buru
37	Kecamatan Durai
38	Kecamatan Kundur Utara
39	Kecamatan Kundur Barat
40	Kecamatan Meral Barat
41	Kecamatan Ungar
42	Kecamatan Belat

Sumber : <http://www.karimunkab.go.id>

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Responden

Di dalam penelitian ini, data di dapatkan dengan cara peneliti menyebarkan kuesioner kepada OPD Kabupaten Karimun. Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas, Kasubag Keuangan serta Staf Penyusun Laporan Keuangan di masing-masing OPD. Penyebaran kuesioner ini di mulai sejak tanggal 16 Maret 2020 dan selesai pada tanggal 21 Maret 2020. Pada setiap Dinas atau Instansi dibagikan 3 kuesioner. Dari 30 sampel yang akan diteliti, disebarkan sebanyak 90 kuesioner (100%). Terhitung dari sejak kuesioner tersebut dibagikan hingga batas waktu pengumpulan data kuesioner yang diterima kembali adalah 80 (90%), dan kuesioner yang tidak kembali adalah 10 kuesioner(12,5%), dikarenakan kuesioner tersebut hilang di beberapa OPD. Agar lebih jelas dapat memperhatikan Tabel V.1 ini:

Tabel 4.2

Jumlah Responden dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total Kuesioner yang disebar	90	100%
Total Kuesioner yang kembali	80	88,89%
Total Kuesioner yang tidak kembali	10	12,5%
Total Kuesioner yang tidak dapat di analisis	-	-
Total Kuesioner yang dapat di analisis	80	88,89%

Sumber: Data Olahan, 2020

Karakteristik dari responden dalam penelitian yaitu jenis kelamin, latar belakang Pendidikan, Pendidikan terakhir, jabatan dan lama bekerja. Adapun

karakteristik responden pada instansi/dinas di Kabupetn Karimun dapat dilihat pada table V.2 berikut.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden pada Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun

No	Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin		
	1. Laki-laki	30	37,5%
	2. Perempuan	50	62,5%
	Total	80	100%
2	Pendidikan Terakhir		
	1. SMA	8	10%
	2. D3	15	18,75%
	3. S1	43	53,75%
	4. S2	12	15%
	5. Lain-lain	2	2,5%
	Total	80	100%
3	Latar Belakang Pendidikan		
	1. Akuntansi	45	56,25%
	2. Manajemen	16	20%
	3. Ekonomi Pembangunan	7	8,75%
	4. Lain-lain	12	15%
	Total	80	100%
4	Jabatan		
	1. Kepala Dinas	9	11,25%
	2. Kepala Subbagian Akuntansi	28	35%
	3. Staf Pencatatan Keuangan	43	53,75%
	Total	80	100%
5	Masa Kerja		
	1. 1-5 tahun	20	25%
	2. 6-10 tahun	44	55%
	3. >10 tahun	16	20%
	Total	80	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel V.2, menunjukkan bahwa dari 80 responden jumlah responden laki-laki sebanyak 30 orang atau berjumlah sekitar 37,5 % dan jumlah responden perempuan sebanyak 50 orang atau berjumlah sekitar 62,5 %. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan, dikarenakan anggota pegawai dari kasubag keuangan dan stafnya dominan berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan tabel V. menggambarkan bahwa untuk Pendidikan terakhir setiap responden dari berbagai instansi adalah SMA sebanyak 8 responden atau sekitar 10%, untuk Diploma 1 (D3) adalah 15 orang atau sekitar 18,75% sedangkan bergelar Strata 1 (S1) berjumlah 43 orang atau sekitar 53,75%, serta untuk responden bergelar Pasca Sarjana (S2) yaitu adalah 12 orang atau sekitar 15% serta Lain-lain berjumlah 2 orang atau sekitar 2,5%

Berdasarkan tabel V.2 menggambarkan bahwa latar belakang Pendidikan responden yaitu untuk latar belakang ekonomi akuntansi berjumlah 45 responden atau sekitar 56,25%, untuk latar belakang manajemen berjumlah 16 responden atau sekitar 20%, untuk latar belakang ekonomi pembangunan sebanyak 7 responden atau sekitar 8,75% dan untuk latar belakang lainnya berjumlah 12 responden atau sekitar 15%.

Berdasarkan tabel V.2 menunjukkan bahwa 20 responden atau 25% telah bekerja 1-5 tahun. Untuk 6-10 tahun berjumlah sebanyak 44 responden atau 55% dan untuk masa kerja lebih dari 10 tahun berjumlah sebanyak 16 responden atau 20%.

4.2.2 Teknik Analisis Data

4.2.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah ringkasan data data penelitian. Statistic deskriptif membantu menyederhanakan data yang berjumlah cukup besar. Dalam penelitian ini yang menjadi variable independen yaitu sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan variable dependen didalam penelitian ini adalah nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah di sebarakan, tabel *descriptive statistic* dapat dilihat pada tabel V.3:

Tabel 4.4

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SPI	80	12.00	43.00	38.5500	4.30455
PKD	80	12.00	39.00	33.2625	3.75430
NILKP	80	14.00	48.00	41.6125	4.81951
Valid N (listwise)	80				

Sumber : Data Output SPSS 26, 2020

Berdasarkan tabel V.3 tersebut, Sistem Pengendalian Intern (X1) mempunyai nilai minimum 12 dan nilai maksimum 43, nilai rata-rata dari jawaban responden adalah 38,55 dengan standar deviasi 4,304.

Pengawasan keuangan daerah mempunyai nilai minimum 12 dan nilai maksimum 39, nilai rata rata dari jawaban responden adalah 33,26 dengan standar deviasi 3,754.

Sementara Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah mempunyai nilai minimum 14 dan nilai maksimum 48, nilai rata-rata dari jawaban responden 41,61 dengan standar deviasi 4,819. Nilai mean di peroleh dari seluruh total skor pada masing masing variabel dan di bagi jumlah responden. Sementara semakin tinggi nilai dari standar deviasi artinya semakin bervariasi jawaban responden. Semakin rendah standar deviasi maka tidak ada variasi jawaban dari responden.

4.2.2.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data digunakan untuk menguji validitas serta reliabilitas data yang akan digunakan oleh peneliti. Ghazali (2011) memberi pernyataan bahwa kualitas data dapat dihasilkan dari penggunaan instrument penelitian serta bisa di evaluasi melalui uji reliabilitas dan validitas. Fungsi dari uji validitas itu sendiri berguna untuk mengukur sah atau tidaknya sebuah kuesioner. Sementara itu, uji reabilitas digunakan sebagai pengukur sebuah kuesioner yang merupakan indicator dari variabel.

4.2.2.2.1 Uji Validitas

Validitas suatu data bisa diperoleh dari proses pengukuran yang kuat. Suatu instrument dapat dinyatakan bahwa memiliki validitas data yang kuat sebab instrument itu mengukur apa yang sebenarnya di harus ukur. Uji validitas di dalam penelitian ini dilakukan agar mengetahui apakah pernyataan pada setiap kuesioner yang telah dibagikan tersebut dapat mengukur variabel yang akan diukur. Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel V.4 berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Data

Variabel	<i>Pearson correlation</i>	Kesimpulan
Sistem Pengendalian Intern	0,544**-0,765**	Valid
Pengawasan Keuangan Daerah	0,676**-0,838**	Valid
Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah	0,707**-0,818**	Valid

Sumber: Data Output SPSS, 2020

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan Corrected Item-Total Correlation dimana $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data tersebut bisa dikatakan valid. Sementara itu r_{tabel} untuk $N = 80$ adalah 0,220. Hasil pengujian validitas yang telah dijelaskan pada tabel V.4 menyatakan bahwa skor untuk instrument sistem pengendalian intern nilai terkecil 0,544. Instrumen pengawasan keuangan daerah nilai terkecil 0,676. Dan nilai informasi laporan keuangan pemerintah 0,707. Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan variabel sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah serta nilai informasi laporan keuangan pemerintah adalah valid.

4.2.2.2.3 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur konsistensi suatu penelitian dengan nilai *Cronbach's Alpha Coefficient*. Hasil uji reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's alpha	Keterangan
Sistem Pengendalian Intern	9	0,844	Reliabel
Pengawasan Keuangan Daerah	8	0,888	Reliabel
Nilai Informasi Laporan Keuangan	10	0,923	Reliabel

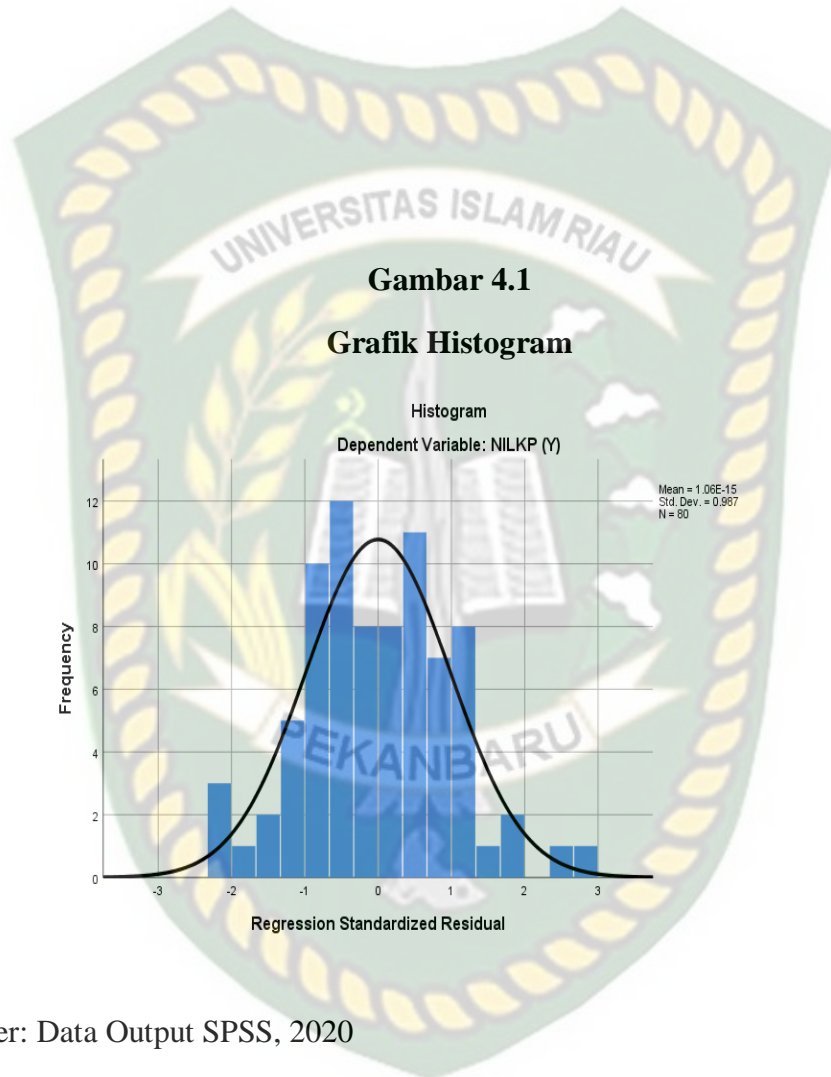
Sumber: Data Output SPSS, 2020

Tabel V.5 menunjukkan masing masing item mulai dari sistem pengendalian intern memiliki nilai 0,844 , pengawasan keuangan daerah memiliki nilai 0,888 dan nilai informasi laporan keuangan memiliki nilai 0,923. Ini berarti semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Sebaliknya jika keandalan kurang dari 0,60 maka dianggap buruk. Sementara jika keandalan berada di 0,70 bisa diterima. Karena hasil uji diatas menggambarkan bahwa tiap item memiliki nilai diatas 0,70 dan mendekati 1,0 maka semua instrumen penelitian dapat dikatakan telah reliabel.

4.2.4 Uji Asumsi Klasik

4.2.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengolah data dalam sebuah model regresi. Model regresi yang baik yaitu saat model memiliki sebuah distribusi yang normal, atau mendekati normal. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah grafik histogram, kurva penyebaran P-plot dan *one sample Kolmogrov-Smirnov Test* yang tampak pada gambar berikut:

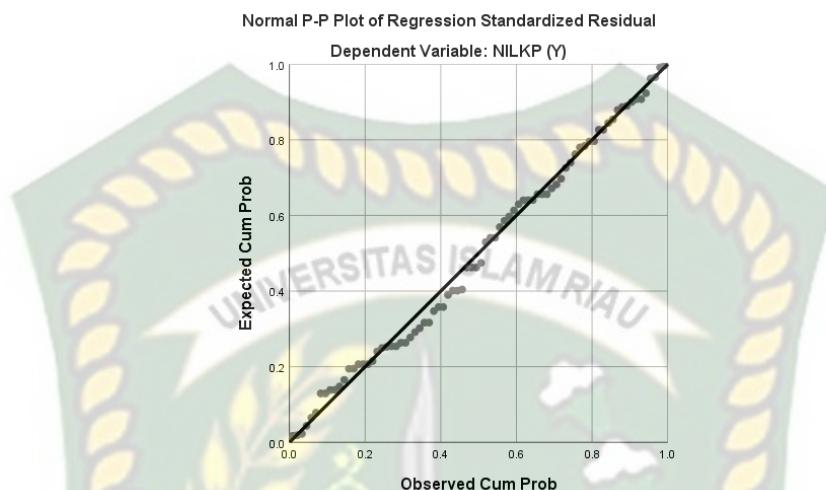


Sumber: Data Output SPSS, 2020

Berdasarkan gambar V.1 diatas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram tersebut memberikan pola distribusi yang mendekati normal.

Gambar 4.2

Normal Probability Plot



Sumber: Data Output SPSS, 2020

Sementara itu pada gambar V.2 menunjukkan bahwa penyebaran data berada disekitar garis diagonal dan selalu mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusi yang terjadi pada gambar diatas adalah normal.

Tabel 4.7

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters a,b	Mean	0
	Std. Deviation	,0000000
Most Extreme Difference	Absolute	1,98789600
	Positive	,061
	Negative	,061
Test Statistic		-,051
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data Output SPSS,2020

Dari tabel tersebut bisa diketahui bahwa hasil uji normalitas menyatakan kolmogrov-smirnov test dengan nilai signifikan 0,200. Berdasarkan hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.2.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Adapun hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel V.7 berikut ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikorelasionalitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Sistem Pengendalian Intern (X1)	,222	4,515
Pengawasan Keuangan Daerah (X2)	,222	4,515

Sumber: Data Output SPSS, 2020

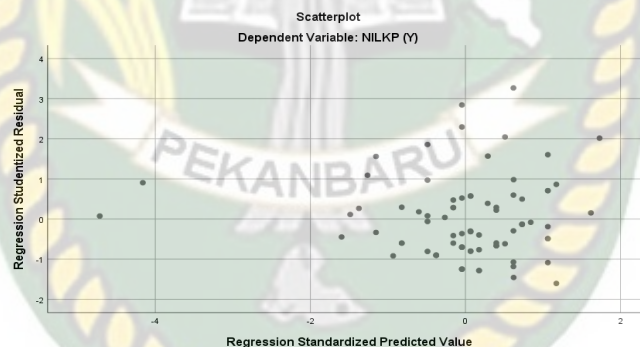
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji multikolinieritas variabel dari sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah memiliki nilai VIF yakni 4,515 dan nilai tolerance 0,222. Dari kedua variabel tersebut nilai tolerance diatas atau lebih dari 0,10 dan nilai VIF dibawah atau kurang dari 10. Dengan demikian bisa di tarik kesimpulan bahwa tidak

terdapat korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah dari pengaruh multikolinieritas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang telah dibentuk.

4.2.4.3 Uji Heterokedastisitas

Dalam uji regresi, heterokedastisitas terjadi jika titik-titik (poin-poin) membentuk suatu pola tertentu baik secara teratur maupun tidak teratur. Pola itu sendiri berbentuk gelombang melebar dan menyempit.

Gambar 4.3



Sumber: Data Output SPSS,2020

Berdasarkan hasil scatter plot menunjukkan bahwa titik penyebarannya tidak membentuk suatu pola yang jelas serta tidak memiliki pola yang teratur. Sehingga dari analisis data diatas dapat disimpulkan variabel sistem pengendalian intern (X1) dan pengawasan keuangan daerah (X2) tidak terjadi heteroskedasitas.

4.2.5 Teknik Analisis Data

Analisis regresi linier berganda dilakukan agar mengetahui apakah pengaruh sistem pengendalian intern (X1) dan pengawasan keuangan daerah (X2) terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah (Y) pada OPD Kabupaten Karimun.

Hasil regresi linier berganda menggunakan SPSS 26 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,479	2,093		,707	,482
SPI	,770	,112	,688	6,888	,000
PKD	,314	,128	,244	2,448	,041

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah :

$$Y = 1,479 + 0,770 X_1 + 0,314 X_2 + e$$

Hasil dan pembahasan regresi diatas adalah :

- a. Nilai konstanta (α) sebesar 1,479 artinya jika variabel independent yakni sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah bernilai 0 (nol) maka nilai informasi laporan keuangan bernilai 1,479.
- b. Nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian (X_1) bernilai 0,770 dimana bisa diartikan bahwa setiap peningkatan sistem pengendalian intern sebesar 1 maka akan terjadi peningkatan nilai informasi keuangan pemerintah sebesar 0,770 atau 77 % dengan asumsi variabel lainnya bersifat konstan.
- c. Nilai koefisien regresi variabel pengawasan keuangan daerah (X_2) bernilai 0,314 dimana bisa diartikan bahwa setiap peningkatan pengawasan keuangan daerah sebesar 1 maka akan terjadi peningkatan nilai informasi laporan keuangan sebesar 0,314 atau 31,4% dengan asumsi variabel lainnya konstan.

4.2.6 Pengujian Hipotesis

4.2.6.1 Koefisien Determinasi

Tabel 4.10

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.911 ^a	.830	.825	2.0135

a. Predictors: (Constant), PKD, SPI

b. Dependent Variable: NILKP

Sumber: Data Output SPSS, 2020

Pada tabel *model summary* diatas dijelaskan bahwa koefisien korelasi (R) sebesar 0,911 mendekati 1 artinya hubungan antara variabel sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan sangat erat. Korelasinya bersifat positif artinya jika nilai variabel independent naik, maka direspon dengan kenaikan dari nilai variabel dependen.

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,830 artinya bahwa 83% nilai informasi laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variasi variabel independent yaitu sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan sisanya 17% dapat dijelaskan oleh variabel lain atau faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model persamaan regresi ini.

4.2.6.2 Uji Parsial (Uji t- test)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan. Pengujian ini dilaksanakan dengan melihat tingkat signifikan dari setiap variabel. Apabila signifikan tersebut $<0,05$ maka hipotesis akan diterima. Sedangkan apabila signifikan $>0,05$ maka hipotesis tersebut ditolak. Hasil uji t terhadap variabel penelitian dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,479	2,093		,707	,482

SPI	,770	,112	,688	6,888	,000
PKD	,314	,128	,244	2,448	,041

Sumber : Output SPSS 26,2020

a. Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas maka diperoleh hasil uji T yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independent. Dimana signifikansinya $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (X1) berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.

b. Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas maka diperoleh hasil uji T yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independent. Dimana signifikansinya $0,041 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah (X2) berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.

4.2.6.3 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan F digunakan agar mengetahui apakah setiap variabel independen yaitu sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama (simultan) dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu nilai informasi laporan keuangan. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel V.8 berikut :

Tabel 4.12**ANOVA^a**

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1522.801	2	761.400	187.797	.000 ^b
Residual	312.187	77	4.054		
Total	1834.988	79			

a. Dependent Variable : NILKP (Y)

b. Predictors : (Constant) PKD (X2), SPI (X1)

Sumber : Data Output SPSS, 2020

c. Hipotesis Ketiga

Dari hasil output SPSS menggambarkan bahwa uji F akan menghasilkan nilai F hitung sebesar 187,797 dengan tingkat signifikan 0,000. Karena tingkat signifikan dibawah nilai 0,05 maka artinya sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Sistem Pengendalian Intern (X₁) terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil uji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas t hitung untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 6,888 dengan nilai signifikan 0,000. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 ini menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Berpengaruh signifikannya sistem pengendalian intern dikarenakan tingginya sistem pengendalian intern pemerintah di Kabupaten Karimun. Semakin tinggi sistem pengendalian intern pemerintah di Kabupaten Karimun maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan yang akan dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Karimun.

Adanya sistem pengendalian intern yang baik, maka akan mempermudah setiap OPD untuk melaksanakan fungsi-fungsi kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pemerintah sebaiknya mengkaji ulang mengenai sistem pengendalian intern dalam pembuatan laporan keuangan agar nilai informasi laporan keuangan dari pemerintah bisa ditingkatkan pada setiap periode.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu Gerry Armando (2013), Feti Ermawati (2015), Dwi Utama Mandala Putra (2015), Suherni (2017) yang mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.3.2 Pengawasan Keuangan Daerah (X₂) Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil uji pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

Hal ini digambarkan oleh nilai probabilitas t hitung untuk variabel pengawasan keuangan daerah sebesar 2,448 dengan tingkat signifikan 0,017. Dikarenakan nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 ini menunjukkan bahwa variabel pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel nilai informasi laporan keuangan.

Dari 80 responden pada OPD di kabupaten Karimun yang diteliti, pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan dapat dikategorikan baik. Namun masih ada beberapa hal yang harus di evaluasi untuk mengurangi terjadinya kesalahan atau penyimpangan tugas. Jika hal tersebut dibiarkan, ini akan mempengaruhi kualitas dari nilai informasi laporan keuangan yang telah dibuat oleh masing masing OPD.

Berpengaruh signifikannya pengawasan keuangan daerah disebabkan oleh tingginya pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Karimun seperti pelaksanaan realisasi APBD sesuai dengan asas umum pengelolaan daerah serta penyusunan APBD yang sesuai dengan perencanaan daerah. Semakin tinggi pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Karimun, maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan yang akan dihasilkan oleh pemerintah

Kabupaten Karimun. Pengawasan keuangan daerah berperan penting untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah tersebut berjalan sesuai rencana sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu Gerry Armando (2013), Windy Febrianti (2015), Feti Ermawati (2015), Suherni (2017) yang mengemukakan bahwa pengawasan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

4.3.3 Sistem Pengendalian Intern (X_1) dan Pengawasan Keuangan Daerah (X_2) terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Secara simultan variabel sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel V.8 pada uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 187.797 dengan tingkat signifikan 0,000. Dikarenakan probabilitas yang jauh lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah sama-sama berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Gerry Armando (2013).

Dalam sistem pengendalian intern setiap OPD harus memiliki kode etik pegawai, pimpinan memberikan contoh yang baik untuk berperilaku dalam berorganisasi. Setiap transaksi juga harus dilengkapi dengan bukti yang valid dan tidak dapat dilakukan tanpa adanya otoritas dari pihak yang berwenang.

Pengawasan keuangan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga berperan dalam meningkatkan nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Ini juga disertai oleh realisasi APBD sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan yang harus disajikan secara akurat.

Nilai informasi laporan keuangan daerah harus dilengkapi oleh keandalan dalam setiap informasi yang diperoleh serta laporan yang disusun oleh OPD agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam tolak ukur untuk laporan keuangan pada masa yang akan datang, serta OPD harus mampu menyelesaikan laporan keuangan dengan tepat waktu.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan hasil penelitian, Sistem Pengendalian Intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun
- 2) Berdasarkan hasil penelitian, Pengawasan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun.
- 3) Berdasarkan hasil penelitian Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah secara Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun.

5.2 Saran – Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan, penulis ingin memberikan beberapa saran untuk pemerintah Kabupaten Karimun dan juga untuk penelitian yang akan datang agar penelitian ini selanjutnya akan berlangsung jauh lebih baik. Saran-saran yang akan penulis berikan antara lain :

- 1) Bagi penulis adalah agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih tentang akuntansi di bidang pemerintahan.
- 2) Bagi akademik peneliti selanjutnya agar dapat melengkapi metode survei untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab pertanyaan yang ada. Dan mengurangi subjektivitas dari responden yang mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap bias dari jawaban responden. Serta dapat melakukan tambahan variabel-variabel lainnya yang berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah, menambahkan teori-teori lainnya dan peraturan pemerintah terbaru yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah.
- 3) Bagi sektor publik seperti pemimpin dan pegawai yang bekerja di OPD Kabupaten Karimun menjaga dan mempertahankan Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun dan terus mengevaluasi setiap pekerjaan yang telah dilakukan guna untuk meningkatkan kualitas dari laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Arfianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD di Kabupaten Batang*. Skripsi. Fakultas Universitas Diponegoro.

Armando, Gerry. 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah pada SKPD di Kota Bukit Tinggi*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.

Ermawati, Feti. 2015. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kabupaten Pelalawan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Febrianti, Windy. 2015. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Pujiswara, 2014. *Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.

Putra, Dwi Utama Mandala. 2017. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Kampar)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Ryades, Alfha. 2016. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Humas Karimun. 2018. Pemerintahan di <http://www.karimunkab.go.id> [di akses tanggal 19 Desember 2019]

Pelayanan Informasi Publik BPK.2010.IHPS di <http://www.bpk.go.id> [di akses tanggal 19 Desember 2019]

Pelayanan Informasi Publik BPK.2009.IHPS di <http://www.tanjungpinang.bpk.go.id> [di akses tanggal 19 Desember 2019]

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat

Lukito, Penny Kusumastuti. 2014. Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Mardiasmo, 2007. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI

Mulyadi. 2013. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat

Mulyanto, Agus. 2009. Sistem Informasi Konsep & Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nordiawan, Deddy. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Melalui <http://www.google.com> . [di akses tanggal 19 November 2019]

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui <http://www.google.com>. [di akses tanggal 19 November 2019]

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Melalui <http://www.google.com>. [di akses tanggal 19 November 2019]

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Melalui <http://www.google.com> [di akses tanggal 19 November 2019]